



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 14 Maret 2017

Halaman: 2

Cukup Diberi Tanda Pelat Khusus

KETIKA para pengemudi taksi berargometer meninggalkan kantor DPRD Kota Jogja, pada saat bersamaan Paguyuban Pengemudi Online Jogja (PPOJ) dan Pengusaha Aplikasi Online gantian datang. Meski sempat berpapasan di halaman DPRD Kota Jogja, tidak ada saling serang diantara keduanya. Belasan anggota PPOJ dan Pengusaha Aplikasi Online tersebut gantian meminta dukungan anggota DPRD Kota Jogja untuk membantu mereka. Terlebih selama ini mereka merasa tidak pernah diajak berkomunikasi oleh Pemprov DIJ.

Mereka menduga langkah Gubernur DIJ tersebut sebagai imbas aksi demonstrasi pengemudi taksi konvensional beberapa waktu lalu. "Selama ini tidak pernah diajak bicara *kok* tahu-tahu ada berita Gubernur DIJ mau mengeluarkan Pergub larangan angkutan umum *online*," ujar perwakilan PPOJ Daniel Victor Agustinus.

Menurut dia, langkah yang diambil Pemprov DIJ tersebut dinilai tidak adil. Daripada melarang operasional layanan aplikasi *online*, Daniel mengatakan, seharusnya Pemprov DIJ menggandeng pengemudi taksi konvensional untuk bergabung ke aplikasi transportasi *online*. "Kami *welcome* kalau mereka mau gabung, sekarang *kan* juga sudah ada yang gabung dengan layanan aplikasi transportasi *online*," jelasnya.

Daniel bahkan sempat mengingatkan petisi ke www.change.org

yang isinya meminta Gubernur DIJ membatalkan rencana pengub berkaitan taksi *online* di DIJ. Sejak diunggah pada Minggu (12/3) pukul 08.00 hingga kemarin sore sudah lebih dari 2.500 orang yang menandatangani petisi tersebut.

Menurut Daniel, yang menandatangani petisi tersebut bukan hanya dari pengemudi saja. "Banyak wisatawan yang juga mendukung transportasi *online* ini karena memudahkan dalam mengaksesnya," jelas dia.

Perwakilan Pengusaha Aplikasi Online Rudi Budiyo menambahkan, Pemprov DIJ seharusnya meniru langkah yang diambil Pemprov Bali maupun Pemkot Makassar yang melegalkan layanan transportasi *online*, dengan memberikan stiker atau tanda pelat khusus. "Banyak yang sekarang menggantungkan hidup, bahkan ada yang baru menurunkan mobil baru," tuturnya.

Terkait dengan permintaan mengganti ke pelat kuning, Rudi menilai, seharusnya tidak perlu. Sebab, mereka dikategorikan sebagai angkutan sewa khusus. Berbeda dengan taksi yang mangkal mencari penumpang, untuk angkutan sewa khusus hanya menunggu orderan saja. "Kami tidak seperti jalangkung, kami datang kalau dipesan saja," jelasnya.

Rudi menambahkan, untuk memenuhi persyaratan, dalam merekrut sopir tidak dilakukan sendiri, tapi melalui vendor. Termasuk mengurus izin penyelenggaraan angkutan nontrayek serta sopir dengan SIM A umum. (pra/ila/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005